

Katalog: 2104025.5105

INDEKS PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN GENDER
KABUPATEN KLUNGKUNG

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

INDEKS PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN GENDER
KABUPATEN KLUNGKUNG

2020

<https://klungkungkab.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kabupaten Klungkung Tahun 2020

ISBN : 978-602-6840-63-9

No. Publikasi : 51050.2118

Katalog BPS : 2104025.5105

Ukuran Buku : 148 x 210 mm

Jumlah Halaman : x + 48 halaman

Naskah : BPS Kabupaten Klungkung

Gambar Kulit : BPS Kabupaten Klungkung

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung

Jl. Raya Besakih, Desa Akah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung,

Bali 80716

Telp. (0366) 21180

E-mail : bps5105@bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

**Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Kabupaten Klungkung Tahun 2020**

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Ni Putu Minarni S., M.M.A.

Penanggung Jawab Teknis:

Made Sukma Hartania, S.S.T.

Koordinator:

Made Sukma Hartania, S.S.T.

Anggota:

I Gusti Agung Dwi Purnami, S.Tr.Stat.

Desain Cover:

I Gusti Agung Dwi Purnami, S.Tr.Stat.

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

KATA PENGANTAR

Kesetaraan gender merupakan target penting dalam pembangunan manusia, baik dalam lingkup global maupun nasional. Pencapaian upaya dan program peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan gender dievaluasi dengan berbagai ukuran seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Di Indonesia, pengukuran kesetaraan gender telah dimulai sejak tahun 2009 dengan dipublikasikannya IPG dan IDG. Kedua indeks tersebut merujuk pada ukuran yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang telah dipublikasikan sejak tahun 1995.

Publikasi Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kabupaten Klungkung Tahun 2020 merupakan publikasi pertama yang menyajikan data dan analisis IPG dan IDG Kabupaten Klungkung sampai pada tahun 2020. Semoga publikasi capaian pembangunan dan pemberdayaan gender yang berjudul “Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kabupaten Klungkung Tahun 2020” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Klungkung, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Klungkung



Ir. Ni Putu Minarni S., M.M.A.

DAFTAR ISI

Bab	Sub Bab	Keterangan	Halaman
		KATA PENGANTAR	v
		DAFTAR ISI	vii
		DAFTAR GRAFIK	ix
I		PENDAHULUAN	1
	I.1	Pembangunan Berbasis Gender	3
	I.2	Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	4
	I.3	Pemberdayaan Gender	8
	I.4	Tujuan Penulisan	11
	I.5	Tata Letak Penyusunan Publikasi	11
II		METODOLOGI PENGHITUNGAN	13
	II.1	Sekilas tentang IPM, IPG dan IDG	15
	II.2	Penghitungan IPM	18
	II.3	Penghitungan IPG	21
	II.4	Penghitungan IDG	23
III		KAJIAN IPG DAN IDG KABUPATEN KLUNGKUNG	25
	III.1	Gambaran Sosial Ekonomi Kabupaten Klungkung	27
	III.2	Perkembangan IPG dan Komponennya di Kabupaten Klungkung	30
	III.3	Perkembangan IDG dan Komponennya di Kabupaten Klungkung	34
		DAFTAR PUSTAKA	39

LAMPIRAN	43
Daftar Istilah	45
Teknis Penghitungan	47

<https://klungkungkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Bab	No	Keterangan	Halaman
III	III.1	Proporsi Penduduk Klungkung Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 - 2021 (Persen)	29
	III.2	IPM dan IPG Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali, Tahun 2010 - 2020	30
	III.3	UHH Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Klungkung, Tahun 2010 - 2020	31
	III.4	HLS Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Klungkung, Tahun 2010 - 2020	32
	III.5	RLS Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Klungkung, Tahun 2010 - 2020	33
	III.6	Pengeluaran Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Klungkung, Tahun 2010 - 2020	34
	III.7	IDG Kabupaten/Kota se-Bali, Tahun 2019 - 2020	36
	III.8	Sumbangan Pendapatan Klungkung dan Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Tahun 2017 - 2020	37

BAB I

PENDAHULUAN

- **Pembangunan Berbasis Gender**
- **Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**
- **Pemberdayaan Gender**
- **Tujuan Penulisan**
- **Tata Letak Penyusunan Publikasi**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Pembangunan Berbasis Gender

Pemahaman tentang istilah gender seringkali disamakan dengan perbedaan jenis kelamin secara lahiriah. Padahal gender dan jenis kelamin memiliki perbedaan. Jenis kelamin merujuk pada kondisi biologis baik pada laki-laki maupun perempuan. Karakteristik biologis tersebut bersifat universal dan jelas. Sedangkan gender adalah peran, tanggungjawab, hak-hak, hubungan dan identitas laki-laki dan perempuan yang tercipta dalam suatu kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana peran-peran tersebut berdampak serta berpengaruh satu sama lain. Peran-peran yang ada dapat berubah seiring berjalannya waktu dan berbeda antarwilayah (UNDP, 2007).

Sejalan dengan pengertian tersebut, UNICEF (2017) mendefinisikan gender sebagai istilah yang merujuk pada konstruksi sosial dan budaya yang menjelaskan perbedaan atribut laki-laki dan perempuan merujuk pada peran dan tanggung jawab yang dimiliki. Phillips (2005) menyebutkan bahwa jenis kelamin merupakan kondisi biologis yang relatif tidak berubah antara menjadi laki-laki atau perempuan, sedangkan gender merujuk pada peran dan ekspektasi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut dapat berubah antarwaktu, antartempat dan tahapan kehidupan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa gender merupakan peran, atribut, tanggung jawab yang berbeda yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan dapat mengalami perbedaan antarwilayah, dan perubahan antarwaktu.

Peran berbasis gender dapat berbeda antarwilayah karena adanya variasi budaya serta dapat berubah seiring berjalannya waktu. Konsep gender mencakup ekspektasi tentang perbedaan karakteristik, sikap dan perilaku antara laki-laki dan perempuan, seringkali disebut dengan feminitas dan maskulinitas. Konsep ini digunakan dalam menganalisis bagaimana perlakuan dalam legitimasi perbedaan antar jenis kelamin.

Tidak ada yang salah dalam perbedaan peran yang terjadi antara laki-laki dan perempuan selama keduanya mendapatkan kesempatan serta hak yang sama dalam mengakses berbagai hal dalam kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi serta pengambilan keputusan. Namun yang terjadi, perbedaan perlakuan ini menimbulkan subordinasi pada salah satu di antara laki-laki dan perempuan, sedangkan satu lainnya mengalami dominansi.

Keadaan ini disebut dengan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender terjadi hampir di setiap wilayah di dunia. Ketidaksetaraan yang membayangi laki-laki dan perempuan terjadi dalam berbagai bentuk dan bukan merupakan fenomena yang bersifat homogen. Ketidaksetaraan gender umumnya terjadi karena ada hubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain (Sen, 2001). Berawal dari masalah-masalah yang terjadi, muncul berbagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender.

I.2 Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kondisi, perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mewujudkan segala potensi yang dimiliki. Selain itu, kesetaraan gender juga mencakup hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan baik dari sisi

ekonomi, sosial, budaya dan politik (UNICEF, 2017). Kesetaraan tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menjadi sama tetapi bahwa hak-hak, tanggung jawab dan peluang perempuan dan laki-laki tidak akan bergantung pada apakah mereka dilahirkan laki-laki atau perempuan.

Feminist Government di bawah naungan pemerintah Swedia mengatakan bahwa “Kesetaraan gender adalah sebuah masalah mengenai hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan. Kesetaraan gender juga merupakan alat untuk mendorong pembangunan sosial dan menciptakan perubahan di masyarakat” (Government Offices of Sweden, 2019). Selain itu, berbagai literatur juga menyebutkan bahwa kesetaraan gender berdampak positif pada beberapa indikator pembangunan. UNFPA menyebutkan bahwa kesetaraan gender dapat memajukan pembangunan dan mengurangi kemiskinan (UNFPA, 2018).

Menurut European Institute for Gender Equality (EIGE), peningkatan kualitas kesetaraan gender berdampak positif baik secara individual maupun masyarakat luas. Secara ekonomi, kesetaraan gender dapat mendorong peningkatan PDB perkapita dan perluasan lapangan kerja yang dalam jangka panjang akan berdampak pada pengentasan kemiskinan (EIGE, 2017). KPPPA (2017) mengungkapkan bahwa kesetaraan gender juga akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka (World Bank, 2000).

Dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti

tidak ada pembatasan/gender. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan maka diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing.

Untuk mengevaluasi sejauh mana prioritas pembangunan sudah responsif gender dan mendukung pengarusutamaan gender dapat dilihat dari analisa terhadap data terpilah gender. Indikator - indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran nyata tentang besar kecilnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995. Dari angka IPG ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perkembangan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi aspek-aspek gender.

Kesetaraan gender dimaknai sebagai keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat merealisasikan haknya secara penuh sebagai manusia dan untuk dapat memberikan kontribusi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Oleh sebab itulah kesetaraan

gender menjadi bagian dari target pembangunan bagi negara-negara yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi seperti Indonesia. Ketimpangan pembangunan antarkelompok jenis kelamin mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Pada tahun 2010 United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan Gender Inequality Index (GII) sebagai ukuran ketimpangan gender. GII menggambarkan sejauh mana ketidakefektifan pembangunan manusia dalam tiga aspek pembangunan (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender (UNDP, 2016). GII diharapkan dapat menyempurnakan ukuran ketimpangan gender yang sudah ada sebelumnya, seperti Gender Empowerment Measure (GEM) dan Gender Development Index (GDI) (BPS, 2019).

Pengukuran pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak UNDP (United Nations Development Programme) mengeluarkan laporan berkala HDR (Human Development Report) di tahun 1990 yang mencantumkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara (BPS, 2018). Lima tahun kemudian, UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender.

Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDR, faktor kesetaraan gender selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan

pembangunan setiap negara. Ukuran kesetaraan gender yang disusun UNDP sejak tahun 1995 adalah GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measure). Ukuran-ukuran tersebut bertitik tolak pada konsep kesetaraan. Perhitungan GDI mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal capaian kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Sedangkan GEM mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam sektor sosioekonomi. Di Indonesia, GDI atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan GEM atau IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) telah dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2009 atas kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi pengukuran GDI disertai dengan penghitungan HDI laki-laki dan perempuan. Menyesuaikan perubahan ini, pada tahun 2015 Indonesia merilis IPG metode baru dengan backcasting data hingga tahun 2010. Sementara itu, metode penghitungan IDG belum berubah hingga saat ini meskipun sejak tahun 2010 UNDP telah menghilangkan GEM dalam publikasi tahunannya (HDR). Pada saat yang bersamaan, UNDP mempublikasikan Gender Inequality Index (GII) sebagai salah satu ukuran yang dianggap lebih tepat menggambarkan pemberdayaan sekaligus kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan.

1.3 Pemberdayaan Gender

Secara harfiah, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Menurut Suddholm (2013) dari United Nations, pemberdayaan berarti sebuah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas kehidupan,

mencapai kontrol pada sumber daya dan keputusan yang berdampak pada kehidupan, serta meningkatkan kualitas guna mendapat aksesibilitas dalam berbagai hal.

Dalam kaitannya dengan gender, hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya kontrol yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses hal-hal dalam kehidupan. Selama ini, perempuan cenderung lebih dirugikan dalam berbagai hal. Budaya patriarki yang mengakar menyebabkan perempuan menjadi warga kelas dengan akses yang relatif terbatas dibanding laki-laki. Oleh karena itu, istilah yang umum digunakan secara internasional adalah “Women Empowerment” atau pemberdayaan perempuan yang dianggap sebagai salah satu cara dalam mengatasi kondisi ketidaksetaraan gender.

Pemberdayaan perempuan memiliki arti tentang suatu proses perubahan baik personal maupun sosial bagi perempuan dalam mencapai power, kebebasan atas berbagai pilihan serta bagaimana perempuan dapat mengontrol kehidupan mereka (O’Neil dkk, 2014). Pemberdayaan perempuan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan kemampuan dan pilihan sejalan dengan hak asasi yang mereka miliki. Pada Deklarasi Beijing yang dilaksanakan pada tahun 1995, disepakati bahwa pemberdayaan dan partisipasi penuh perempuan di masyarakat, termasuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan akses kekuasaan, bersifat fundamental untuk pencapaian kesetaraan, pembangunan dan perdamaian (UNDP, 2007).

Di Indonesia, pemberdayaan gender diukur menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan adopsi dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG mengukur

partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Indikator ini disusun oleh tiga komponen yaitu persentase perempuan dalam parlemen, persentase tenaga profesional perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, IDG Indonesia menunjukkan tren meningkat dalam 8 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Indonesia semakin terlihat. Capaian ini didukung dengan perbaikan kualitas perempuan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi dan tenaga kerja.

Pemberdayaan perempuan memiliki berbagai dampak positif. UNFPA (2000) menyebutkan bahwa perempuan yang berdaya berkontribusi pada kesehatan dan produktivitas seluruh keluarga dan masyarakat, dan mereka meningkatkan prospek untuk generasi berikutnya. UN Women (2011) menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan di berbagai sektor perekonomian dapat memperkuat kondisi perekonomian, mencapai target pembangunan internasional dan memperbaiki kualitas hidup tak hanya perempuan tetapi juga laki-laki, keluarga dan komunitas. Di bidang politik, penelitian yang dilakukan oleh Beer (2009) menemukan bahwa negara dengan partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi memiliki rasio Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan dibanding UHH laki-laki yang lebih besar, tingkat fertilitas yang lebih rendah, dan TPAK perempuan yang lebih besar.

I.4 Tujuan Penulisan

Berbagai riset lapangan dan juga analisis teoretis mengenai IPG dan IDG telah banyak diterbitkan baik dalam buku, jurnal maupun publikasi. Sekalipun demikian tujuan dari penulisan publikasi ini secara khusus meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan penulisan publikasi;
2. Memberikan gambaran mengenai metodologi dalam penyusunan IPG dan IDG;
3. Memberikan gambaran mengenai IPG dan IDG Kabupaten Klungkung.

I.5 Tata Letak Penyusunan Publikasi

Publikasi ini disusun dalam III Bab, yaitu:

1. Bab I mengenai latar belakang penyusunan, tujuan penulisan serta tata cara penyajian publikasi;
2. Bab II metodologi dalam penyusunan IPG dan IDG;
3. Bab III mengenai IPG dan IDG di Kabupaten Klungkung.

BAB II

METODOLOGI

PENGHITUNGAN

- **Sekilas tentang IPM, IPG dan IDG**
- **Penghitungan IPM**
- **Penghitungan IPG**
- **Penghitungan IDG**

BAB II

METODOLOGI PENGHITUNGAN

II.1 Sekilas tentang IPM, IPG dan IDG

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia. Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan. Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia.¹ Pembangunan yang hanya menekankan pada

¹ Bagian ini dikutip dari Booklet IPM yang bisa didownload di https://ipm.bps.go.id/assets/files/booklet_ipm.pdf

pembangunan di sisi ekonomi seringkali menyisakan struktur ekonomi yang berbentuk piramida dengan banyak penduduk berada di bawahnya.²

Pembangunan yang berfokus pada manusia akan berupaya untuk terus memperluas horizon dari batas-batas pilihan sebelumnya. Perluasan ini akan memberikan setiap orang ruang aktualisasi yang lebih luas dan dalam dibandingkan dengan sebelumnya. Melalui pemahaman ini kiranya dapat ditarik sebuah pandangan bahwa pembangunan bukan hanya tentang peningkatan faktor produksi ekonomi, akan tetapi juga sumber daya manajerial yang berakar dari manusia itu sendiri. Oleh karenanya pembangunan secara keseluruhan tidak hanya menyangkut ekonomi akan tetapi juga dari sisi sosial. Dalam jangka panjang perbaikan ini menjadi sangat berarti demi tetap terpeliharanya sebuah demokrasi serta kelanggengan suatu budaya dalam melewati sebuah milenia. Bertolak dari hal itu, banyak kalangan menginginkan suatu indikator yang dapat menghitung dan membandingkan suatu capaian pembangunan manusia baik itu antar waktunya maupun lintas wilayahnya. Dari hal-hal inilah kemudian manuskrip mengenai cikal bakal IPM pertama kali ditulis.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks gabungan atau komposit dari angka harapan hidup, pendidikan, dan indikator pendapatan per kapita, yang digunakan untuk membandingkan (atau mengurutkan) tingkat pembangunan manusia dan kemudian mengelompokkannya menjadi empat tingkatan pembangunan manusia. Indeks ini adalah karya ekonom Pakistan Mahbub ul Haq dan ekonom India Amartya Sen dan selanjutnya digunakan untuk mengukur perkembangan suatu negara oleh Kantor Laporan Pembangunan Manusia UNDP.³

² Bagian ini dikutip dari buku Karya Prahalad, *The Fortune at the Bottom of the Pyramid*.

³ Disadur dari <https://wikipedia.org>

Dalam banyak hal, ketersediaan indikator seperti halnya IPM memberikan banyak manfaat yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Di lain pihak dua indikator untuk mengukur aspek gender, yakni: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Diskriminasi gender menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ketimpangan gender. Di berbagai wilayah di dunia, seperti di Indonesia, ketimpangan ini diperkuat dengan tumbuhnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki - laki sebagai pihak yang bertanggung jawab pada peran publik, sedangkan perempuan hanya berkecukupan di peran domestik.

II.2 Penghitungan IPM

Penghitungan IPM Metode baru dilihat dari indikator penyusunnya dapat ditulis sebagai berikut :

IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik yaitu sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} * I_{pendidikan} * I_{Pengeluaran}}$$

- **Indeks Kesehatan** dihitung dengan :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

- **Indeks Pendidikan** dihitung dengan :

$$I_{pendidikan} = I_{HLS} + I_{MYS}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{MYS} = \frac{MYS - MY_{min}}{MYS_{max} - MY_{min}}$$

- **Indeks Pengeluaran** dihitung dengan :

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

- **Nilai maksimum dan minimum** yang disepakati adalah :

Komponen	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Tahun	0	15
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rupiah	1.007.436	26.572.352

* Daya beli minimum adalah garis kemiskinan terendah yaitu Kabupaten Tolikara

** Daya beli maksimum adalah nilai proyeksi pengeluaran per kapita Jakarta Selatan pada tahun 2025

Untuk komponen penyusunnya sendiri penghitungan IPM dilakukan sebagai berikut :

- **Usia Harapan Hidup (UHH)** adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Penghitungan umur harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang bersumber dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Metode estimasi yang digunakan adalah metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan sejarah kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).
- **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

$$HLS_a^t = FK \cdot \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

- HLS_a^t adalah harapan lama sekolah umur a di tahun t
- **FK** faktor koreksi pesantren
- E_i^t adalah jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
- P_i^t adalah jumlah penduduk usia i pada tahun t

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki

$$RLS = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

- **RLS** adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
- **N** adalah jumlah penduduk
- **x_i** adalah lama sekolah penduduk ke - i yang berusia 25 tahun ke atas
- **Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang sudah disesuaikan dengan tingkat harga di kota acuan.

$$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$$

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \cdot 100$$

- **Y^{**}** adalah Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan
- **Y^*** adalah Pengeluaran Per Kapita harga konstan

- Y adalah Pengeluaran per kapita setahun
 - IHK adalah Indeks Harga Konsumen
 - PPP adalah paritas daya beli
-
- **Paritas Daya Beli (PPP)** adalah Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

- PPP_j adalah paritas daya beli di kabupaten/kota
- P_{ij} adalah harga komoditas i di kabupaten/kota j
- P_{ik} adalah harga komoditas i di Jakarta Selatan

II.3 Penghitungan IPG

IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. IPG metode baru ini menggunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki. Perubahan IPG Metode baru terjadi pada indikator yang digunakan dan metodologi penghitungannya, namun dimensi yang digunakan masih tetap sama dengan metode sebelumnya, yaitu: Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); Pengetahuan (*knowledge*); dan Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Penghitungan IPG Metode baru memiliki beberapa keunggulan antara lain; Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan

baik (diskriminatif). Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Secara umum penghitungan IPG dapat ditulis Sebagai berikut :

$$IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{laki-laki}} \cdot 100$$

Adapun penghitungan IPM untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

$$IPM_{laki-laki} = \sqrt[3]{I_{kesehatan(l)} * I_{pendidikan(l)} * I_{Pengeluaran(l)}}$$

$$IPM_{perempuan} = \sqrt[3]{I_{kesehatan(p)} * I_{pendidikan(p)} * I_{Pengeluaran(p)}}$$

Perbedaan nilai acuan untuk masing-masing indikator dapat dituliskan sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		L	P	L	P
Angka Harapan Hidup	Tahun	17,5	22,5	82,5	87,5
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	25	25
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rupiah	26.572.352		1.007.346	

Interpretasi angka IPG, jika semakin mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan semakin setara. Sebaliknya jika semakin jauh dari nilai 100 maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan.

II.4 Penghitungan IDG

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut:

1. **Penyusunan Indeks keterwakilan di parlemen (I_{par}) dan Indeks Pengambilan Keputusan (I_{DM})**

$$EDEP_{par} = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right) \times 100$$

$$I_{par} = \left(\frac{EDEP_{par}}{50} \right)$$

$$EDEP_{DM} = \left(\frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right) \times 100$$

$$I_{DM} = \left(\frac{EDEP_{DM}}{50} \right)$$

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

2. Penyusunan Indeks distribusi pendapatan (Iinc-dis)

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right) \times 100$$

$$I_{(inc-dis)} = \left(\frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times PPP) - 360}{732,72} \right)$$

3. Indeks Pemberdayaan Gender

$$IDG = \frac{I_{par} + I_{DM} + I_{(inc-dis)}}{3}$$

BAB III

KAJIAN IPG DAN IDG KABUPATEN KLUNGKUNG

- **Gambaran Sosial Ekonomi
Kabupaten Klungkung**
- **Perkembangan IPG dan Komponennya
di Kabupaten Klungkung**
- **Perkembangan IDG dan Komponennya
di Kabupaten Klungkung**

BAB III

KAJIAN IPG DAN IDG KABUPATEN KLUNGKUNG

III.1 Gambaran Sosial Ekonomi Kabupaten Klungkung

Secara geografis Klungkung adalah satu-satunya kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terpisah dengan daratan Pulau Bali. Dua pertiga wilayah Klungkung berada di Pulau Nusa Penida yang masih satu gugus pulau dengan Pulau Bali. Perbukitan dan kapur karang merupakan kondisi tanah di pulau ini, salah satunya gunung bukit tertinggi bernama Gunung Mundi yang terletak di Kecamatan Nusa Penida. Sumber air adalah mata air dan sungai hanya terdapat di wilayah daratan Kabupaten Klungkung yang mengalir sepanjang tahun.

Desa-desa pesisir nusa penida di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari ketinggian lahan 0-268 mdpl. Sedangkan di Kecamatan Nusa Penida sama sekali tidak ada sungai. Sumber air di Kecamatan Nusa Penida adalah mata air dan air hujan yang ditampung dalam cubang oleh penduduk setempat. Kabupaten Klungkung termasuk beriklim tropis. Bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering antara Kecamatan Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung daratan sangat berbeda.

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat bahwa jumlah penduduk Klungkung di tahun 2020 mencapai 206,93 ribu jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2010, penduduk Klungkung di tahun 2020 meningkat sekitar 2,09 persen. Meskipun dua pertiga wilayahnya berada di Nusa Penida, konsentrasi penduduk Klungkung justru terletak di wilayah daratan. Hal ini bisa dilihat dari kepadatan penduduk Kecamatan Nusa Penida yang hanya sekitar 283 jiwa/km² atau sepertujuh kepadatan di Kecamatan Klungkung yang mencapai 2.211 jiwa/km².

Dari sisi proporsi angkatan kerja tercatat bahwa pada tahun 2020 sekitar 27 persen penduduk Klungkung bekerja di pertanian. Sebaran angkatan kerja menurut lapangan usaha pun bisa dikatakan tidak merata. Lebih dari 60 persen penduduk Klungkung bekerja di tiga lapangan usaha dengan proporsi terbesar Persebaran yang relatif homogen ini sering merupakan salah satu ciri dari ekonomi yang sebagian besarnya ditopang oleh pertanian.

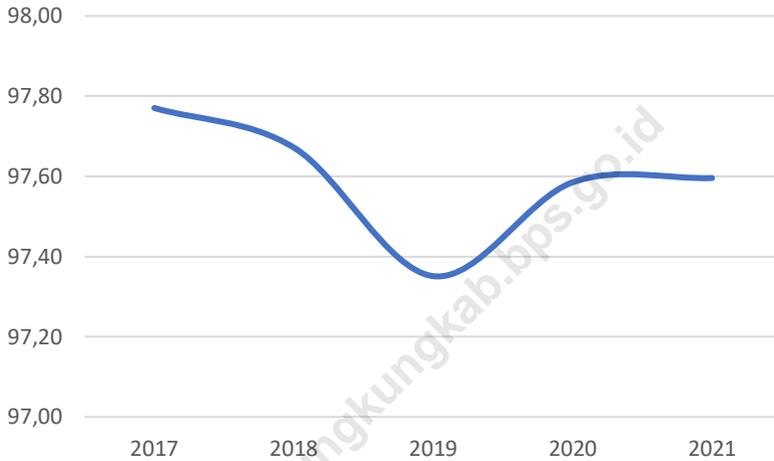
Sekitar 22,5 persen ekonomi Klungkung berasal dari pertanian, sementara 10 persen lainnya dari penyediaan akomodasi dan makan minum (seperti penginapan dan rumah makan). Perlu diketahui bahwa proporsi dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan dari sekitar 15 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Dampak pandemi juga dirasakan pada penyerapan tenaga kerja. Pengangguran di Klungkung pada tahun 2020 tercatat mencapai 5,42 persen.

Di lain pihak hasil penghitungan penduduk miskin di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di tahun 2020 mencapai 4,78 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali yang mencapai 3,78 persen.

Dilihat dari proporsi jenis kelaminnya, lebih cepatnya pertumbuhan penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan mengakibatkan sex ratio di Kabupaten Klungkung terus mengalami kenaikan. Sex ratio mengalami kenaikan dari 97,59 persen menjadi 97,60 persen. Ini adalah sex ratio tertinggi Klungkung dalam lima tahun terakhir. Stagnasi sex ratio Kabupaten Klungkung salah satunya disebabkan karena pertumbuhan penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki secara eksponensial.

Grafik III.1

Proporsi Penduduk Klungkung Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 - 2021
(Persen)



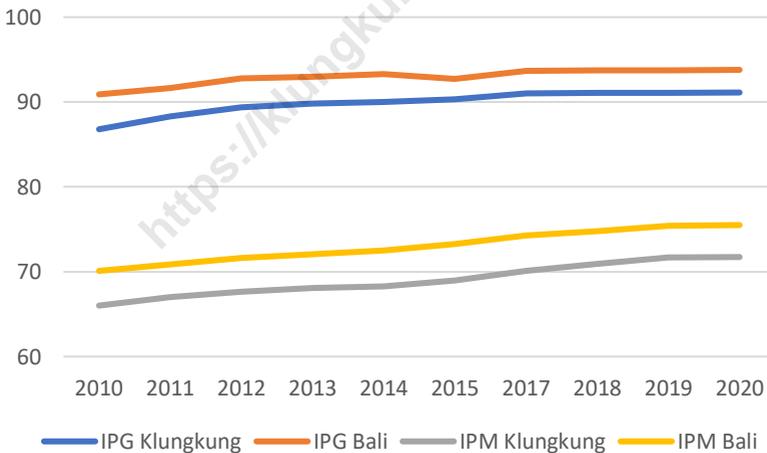
Perhatian mengenai *sex ratio* mengemuka setelah isu mengenai kesetaraan gender menjadi hal yang serius. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

III.2 Perkembangan IPG dan Komponennya di Kabupaten Klungkung

IPG Klungkung pada tahun 2020 tercatat mencapai 91,12 atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 91,10. Capaian ini meningkat sekitar 0,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di lain pihak IPG Provinsi Bali tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2020, IPG Bali mencapai 93,79 atau meningkat 0,07 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 93,72.

Grafik III.2

IPM dan IPG Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali, Tahun 2010 - 2020

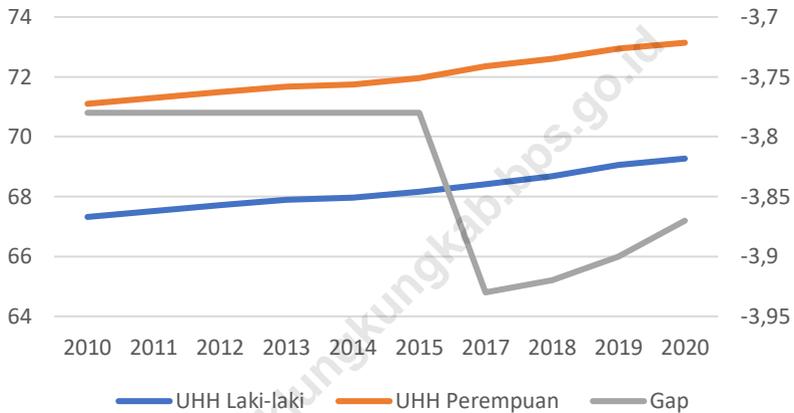


Dilihat dari komponen penyusunnya, maka dapat dilihat bahwa *gap* antara Usia Harapan Hidup (UHH) laki-laki dan perempuan di Kabupaten Klungkung semakin kecil sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 UHH laki-laki hanya terpaut 3,87 tahun lebih kecil dibandingkan dengan

perempuan. Akan tetapi dibandingkan dengan tahun 2010 - 2015, perbedaan di tahun 2020 ini tercatat masih lebih tinggi.

Grafik III.3

UHH Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Klungkung, Tahun 2010 - 2020



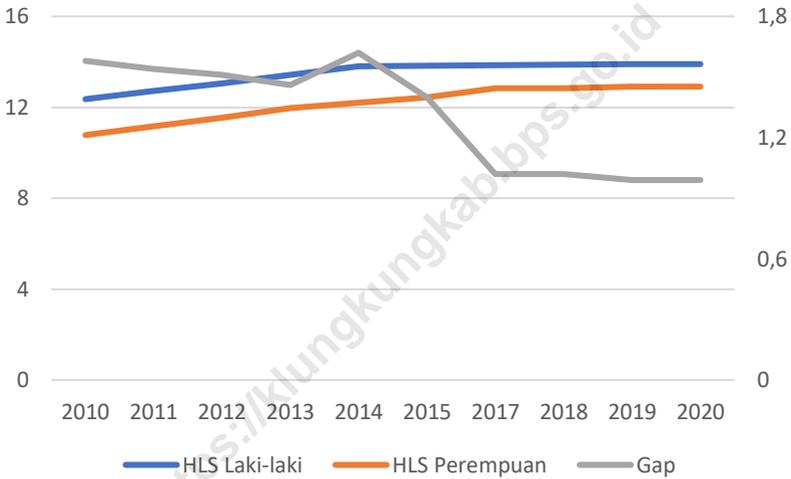
Harapan lama sekolah menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan dalam jangka pendek. Sementara itu rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Dengan demikian, penggunaan kedua indikator ini akan menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan saat ini dan juga dampak pembangunan masa lalu.

HLS di Kabupaten Klungkung untuk penduduk laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. HLS Penduduk laki-laki tercatat mencapai 13,9 tahun sementara untuk perempuan tercatat mencapai 12,9 tahun. *Gap* antara kedua kelompok penduduk ini relatif sangat tinggi. Dengan mengacu pada kesetaraan lama sekolah penduduk laki-laki di Klungkung berpotensi bersekolah hingga semester 4 pendidikan tinggi atau

setara dengan diploma II, sementara itu penduduk perempuan berpotensi untuk bersekolah hingga jenjang pendidikan diploma I.

Grafik III.4

HLS Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Klungkung, Tahun 2010 - 2020

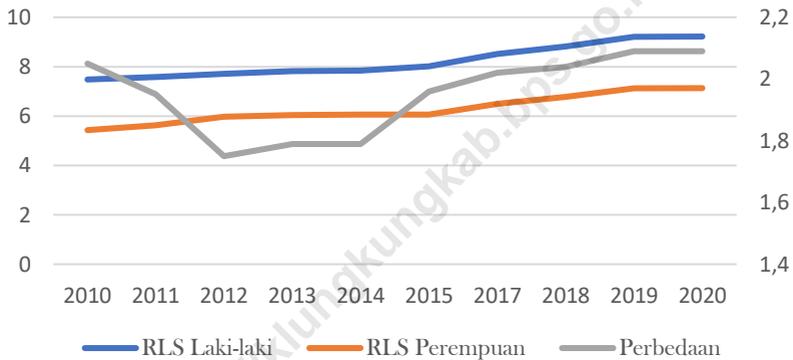


Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klungkung di tahun 2020 mencapai 9,22 tahun atau setara kelas III SLTP. Angka ini hanya sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 9,21 tahun. Di lain pihak rata-rata lama sekolah penduduk perempuan hanya sekitar 7,13 tahun atau setara kelas I SMP. Selain masih rendahnya rata-rata lama sekolah di kedua kelompok lain adalah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya perbedaan rata-rata lama sekolah antar kedua kelompok penduduk ini relatif sangat tinggi dan tidak ada perubahan ke arah yang lebih dekat. Tentu saja hal ini menjadi perhatian penting dalam kaitan dengan

harapan lama sekolah. RLS dan HLS kelompok umur yang cenderung tidak mendekat menunjukkan educational gap yang relatif tidak berubah juga antar tahunnya.

Grafik III.5

RLS Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Klungkung, Tahun 2010 - 2020



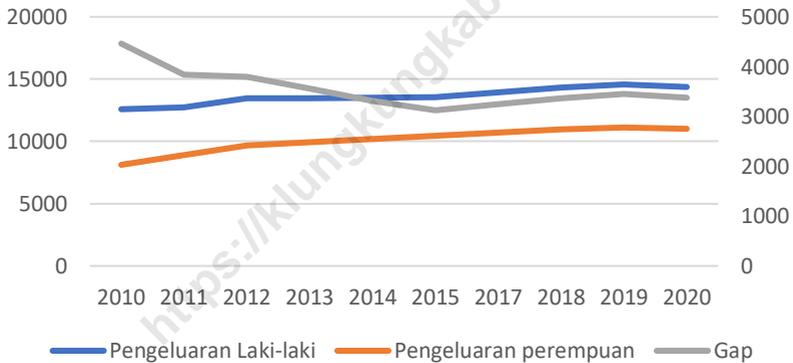
Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pembangunan adalah factor ekonomi. Seringkali keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi kemampuan perekonomian, tak terkecuali dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan gender. Selain tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) poin kelima tentang kesetaraan gender, isu ekonomi juga menjadi fokus pada tujuan kesepuluh yakni “mengurangi kesenjangan”, termasuk di dalamnya kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Klungkung antar jenis kelamin menunjukkan penurunan dari sisi perbedaannya. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 14,4 juta rupiah per

tahunnya sementara untuk perempuan hanya sekitar 11,01 juta rupiah per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setahun terjadi rata-rata perbedaan konsumsi laki-laki dan perempuan pada kisaran sekitar 3,3 juta rupiah. Besaran ini dapat dipadankan dengan pengeluaran sekitar 255 ribu per bulannya.

Grafik III.6

Pengeluaran Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Klungkung,
Tahun 2010 - 2020



III.3 Perkembangan IDG dan Komponennya di Kabupaten Klungkung

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender (<https://www.kemenkopmk.go.id>).

Pertama, di bidang pendidikan. Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Kedua, di sektor kesehatan, Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutris, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana.

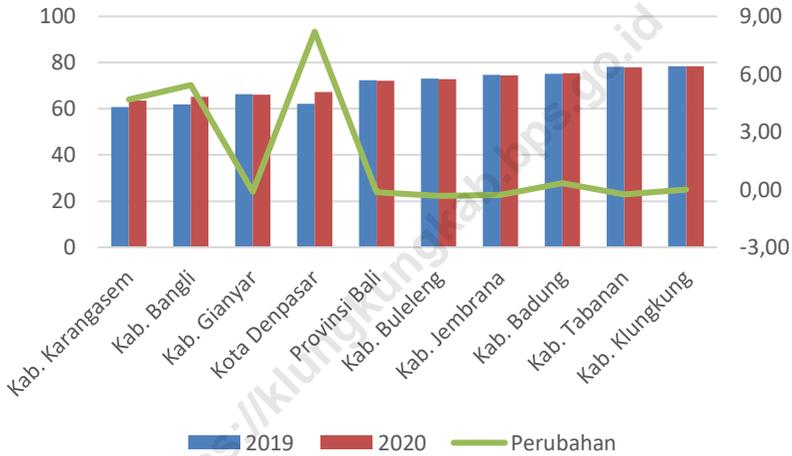
Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender. Terakhir, yang keempat ialah terkait pencegahan kekerasan. Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi anak dan perempuan.

IDG Kabupaten Klungkung di tahun 2020 mencapai 78,36 atau meningkat 0,01 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Kenaikan ini tergolong sangat rendah meskipun perlu diketahui bahwa IDG Kabupaten Klungkung adalah yang tertinggi di Bali. Peningkatan angka ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Namun, kebijakan terkait gender yang telah diterapkan diharapkan tidak hanya mampu berdampak secara nasional, tetapi juga mampu menekan perbedaan capaian antar wilayah di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia, karakteristik sosial,

budaya, keadaan geografi dan masih banyak hal yang berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan gender setiap wilayah.

Grafik III.7

IDG Kabupaten/Kota se-Bali, Tahun 2019 - 2020



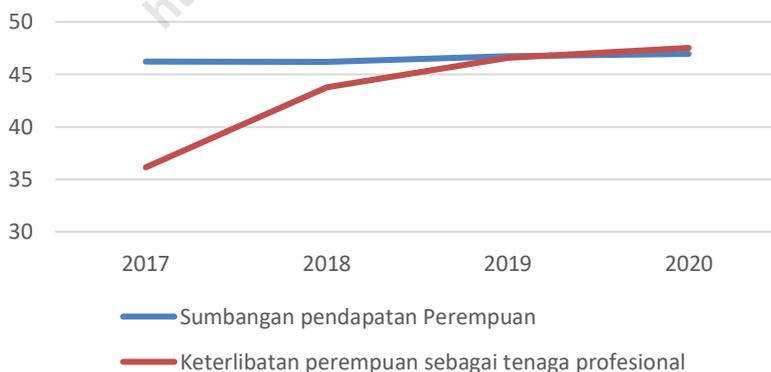
Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum lakilaki. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia. Di Kabupaten Klungkung, partisipasi perempuan di wakikan mencapai 20 persen dari perempuan yang duduk di parlemen untuk tahun 2019-2023.

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Dari grafik berikut dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional meningkat sejak tahun 2017 hingga 2020. Di tahun 2020 persentasenya mencapai 47,52 persen. Di lain pihak sumbangan pendapatan perempuan relatif stagnan meskipun rasio ini meningkat dari 46,73 persen menjadi 46,95 persen di tahun 2020

Grafik III.8

Sumbangan Pendapatan Klungkung dan Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Tahun 2017 - 2020



DAFTAR PUSTAKA

<https://klungkungkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010. Jakarta: CV. Rioma
- Badan Pusat Statistik. 2015. Booklet Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Rao, D. S. Prasada. The Country-Product-Dummy Method: A Stochastic Approach to the Computation of Purchasing Power Parities in the ICP. Working Paper Series No. 03/2004. Australia: CEPA
- UNDP, BPS, dan Bappenas. 2001. Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001: Demokrasi dan Pembangunan Manusia
- United Nations Development Programme. 1993. Human Development Report. New York: UNDP

LAMPIRAN

- Daftar Istilah
- Teknis Penghitungan

<https://klungkung.bps.go.id>

DAFTAR ISTILAH

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks yang berusaha menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

- **Angka Melek Huruf**

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

- **Angka Partisipasi Kasar**

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

- **PDB/PDRB Per Kapita**

Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

- **Rata-rata Aritmetik**

Penghitungan rata-rata dengan menjumlahkan semua nilai dari sampel atau populasi kemudian membaginya dengan jumlah total sampel ataupun populasi.

- **Rata-rata Geometrik**

Penghitungan rata-rata yang dilakukan dengan mengalikan seluruh nilai sampel atau populasi kemudian mengakarkannya sejumlah sampel atau populasi yang digunakan.

- **Status Pembangunan Manusia Capaian**

Dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

TEKNIS PENGHITUNGAN

- **Pertumbuhan IPM (dalam persen)** menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Indikator ini dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} * 100\%$$

$$IPM_t = \text{IPM suatu wilayah tahun ke } - t$$

$$IPM_{t-1} = \text{IPM suatu wilayah tahun ke } - (t - 1)$$



Sensus
Penduduk
2020

DATA

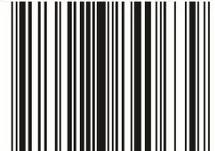
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Jl. Raya Besakih, Desa Akah
Kecamatan Klungkung 80751
Telp: (0366)21180, Fax: (0366) 24242
Homepage: <http://klungkungkab.bps.go.id>
E-mail: bps5105@bps.go.id

ISBN 978-6-02-6840-63-9



9 786026 840639